

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, (Yogyakarta, FH UII Press, 2004).
- Asshiddiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta: Penerbit Konstitusi Pers, 2006).
- D, Evy Trisulo, Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi, (Jakarta: Komisi Informasi Pusat RI Graha PPI, 2015).
- Bappenas, Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana dan Tertib, (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015).
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, (Jakarta, Sekretariat Jenderal DPD RI, 2020).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Konstitusi republik Indonesia menuju perubahan ke-5, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2009).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Laporan Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan, (Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 2021).
- Handoyo, B. Hestu Cipto Handoyo, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009).
- Huda, UU Nurul, Hukum Lembaga Negara, (Bandung: PT Refika Aditama, Bandung, 2020).
- Isharyanto, Hukum Kelembagaan Negara, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015).
- Jatmiko Anom Husodo, Urgensi Lembaga Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mendukung Reformasi Regulasi di Indonesia, Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019).

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Naskah Lengkap UUD 1945 dan Rancangan Perubahan UUD 1945, (Jakarta, Sekretaris Jenderal MPR, 2002).

Manan, Bagir, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, (Jakarta: Ind-Hill, 1992).

Pamungkas, Bani dan Bivitri Susanti, et all, 2000, Semua Harus Terwakili: Studi mengenai Reposisi MPR, DPR dan Lembaga Kepresidenan, (Jakarta: Pusat Studi Kajian Hukum (PSHK), 2000).

Ranawijaya, Usep, Hukum Tata Negara dan Dasar-Dasarnya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

Subardjo, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Suryawan, I Gusti Bagus, Rekonstruksi Pengaturan Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia, (Yogyakarta: Publikasi Global Media, 2020).

Jurnal

Ade Irawan Taufik. (2021). Gagasan Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal RechtsVinding* Volume 10 Nomor 2, <https://rechtsvinding.bphn.go.id> diakses pada 10 Februari 2022.

Anton Hermann Chroust. (1994). *The Philosophy of Law of Gustav Radbruch*. *The Philosophical Review*, Volume 53 Nomor 1, https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1024&context=nd_naturallaw_forum diakses pada 17 Oktober 2021.

Arifin, M.Z. (2019). Suatu Pandangan Tentang Eksistensi Dan Penguatan Dewan. *Jurnal Tengawang*, Vol.1 No.1, <https://sinta.kemdikbud.go.id> diakses pada 25 November 2021.

Bayu Dwi Anggono. (2020). Lembaga Khusus di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Urgensi Adopsi dan Fungsinya dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember*, <https://reository.unej.ac.id> diakses pada 15 Februari 2022.

Garciano Nirahua. (2020). Kedudukan dan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, *Jurnal Hukum Sasi* Vol.26 No.3,

- <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/309> diakses pada 14 Februari 2022.
- Gunardi SA Lumbantoruan. (2021). Desain Strategi Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi. *Jurnal Rechtsvinding* Volume 10 Nomor 2, <https://rechtsvinding.bphn.go.id> diakses pada 5 Maret 2022.
- Hanif Hardianto dan Ratna Herawati. (2020). Ambiguitas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Dewan Perwakilan Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah. *Jurnal Pandecta*, Volume 15, Nomor 1, <https://journal.unnes.ac.id> diakses pada 17 November 2021.
- I Kadek Arimbawa, dkk. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan DPD RI Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Bali, *Jurnal Konstruksi Hukum* Volume 1 Nomor 2, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2600> diakses pada 10 Maret 2022.
- I Putu Indra Prasetya wiguna dan Ni Luh Gede Astariyani. (2019). Pengaturan Pengawasan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 8, Nomor 4, <https://ojs.unud.ac.id> diakses 29 November 2021.
- Ibnu Sina Chandranegara. (2019). Bentuk-Bentuk perampangan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No.3 Vol.26, <https://journal.uui.ac.id> diakses pada 10 Januari 2022.
- Muimin Maaruf. (2010), Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945, *Jurnal Hukum*, <http://eprints.ipdn.ac.id> diakses pada 18 November 2021.
- Putra Astomo. (2014). Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum. *Jurnal Yustisia Edisi 90*.
- Putuhena, M.I.F. (2013). Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 2, Nomor 3, <https://rechtsvinding.bphn.go.id>, diakses pada 15 Februari 2022.
- Sulardi. (2012). Rekonstruksi Kedudukan DPD Dan DPR Menuju Bikameral Yang Setara. *Jurnal Hukum* Vol. 19 No.1, <https://journal.umy.ac.id> diakses pada 21 November 2021.

Widayati. (2015). Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia.
Jurnal MMH Jilid 44 No.4, <https://ejournal.undip.ac.id> diakses
pada 20 November 2021.

Widodo. (2014). Peran Dan Fungsi Dpd RI Dalam Rangka Menuju Sistem
Bikameral Yang Efektif Melalui Amandemen. *Jurnal Pembaharuan
Hukum* Unissula,
[http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/search/titles?searchPage=](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/search/titles?searchPage=16)
[16](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/search/titles?searchPage=16) diakses pada 12 Februari 2022.

Zaherman Armandz Muabezi. (2017). Negara Berdasarkan Hukum
(*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtstaat*) *Rule of Law And
Not Power State. Jurnal Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia*, <https://jurnal.hukum.dan.peradilan.org>, diakses pada
tanggal 15 Oktober 2021

Thesis

Taufik, Ade Irawan, (2020), “Membangun Mekanisme Evaluasi peraturan
Perundang-Undangan Dal (*Ex Post Review*) am Penataan dan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Tesis Magister
Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib.

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang.

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 26/DPD RI/III/2020-2021 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Khususnya Berkenaan Dengan Optimalisasi Upaya Perlindungan Anak Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 50/DPD RI/VII/2020-2021 tentang Hasil Pemantauan dan Peninjauan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Website/Internet

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, “Prolegnas Dalam Pembentukan Undang-Undang di Pemerintah”, www.pushep.or.id diakses pada tanggal 10 November 2021.

Direktori Peraturan Perundang-Undangan, <https://peraturan.go.id/> diakses pada 12 Februari 2022.

Harian Haluan, “Ketua PPUU DPD RI Dr Aliman Sori, Pemantauan dan Peninjauan Terhadap UU itu Penting” <https://www.harianhaluan.com/news/detail/80570/ketua-ppuu-dpd-ri-dr-alirman-sori-pemantauan-dan-peninjauan-terhadap-uu-itu-penting> diakses pada 20 Januari 2022.

Lokadata, “Skor Indonesia dalam *Worldwide Governance Indicators* (WGI) 2017”, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/skor-indonesia-dalam-wgi-2017-1546411925> diakses pada tanggal 12 February 2022.